

Bertarung Makna Ala Media

(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Surat Kabar Harian Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express)

Oleh : Merlina Maria Barbara Apul¹

Abstrak

Penelitian ini mengungkap bagaimana dua surat kabar lokal di Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express (Timex) membingkai konflik pasca pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Peneliti menggunakan metode analisis framing model Entman untuk melihat pembingkai yang dilakukan dua media lokal ini dalam memberitakan konflik pilkada Kabupaten SBD. Hal ini berkaitan dengan bagaimana SKH Pos Kupang dan Timex menyeleksi isu, dan melakukan penonjolan aspek tertentu dari isu, yang terkait dengan konflik tersebut. Dengan analisis framing model Entman, peneliti menemukan dua frame besar yang mewakili SKH Pos Kupang dan Timex ketika membingkai peristiwa. Dua frame ini sejatinya memperlihatkan bagaimana peristiwa yang sama dilihat secara berbeda oleh dua media. SKH Pos Kupang yang cenderung melihat konflik sebagai bentuk dari kesengajaan KPU SBD sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan menonjolkan fakta penggelembungan suara. Sebaliknya Timex, membingkai konflik yang merupakan bentuk dari ketidakberdayaan KPU SBD sebagai penyelenggara pemilu. Ini ditunjukkan Timex dengan menonjolkan kelalaian KPU SBD yang hanya menempatkan dirinya sebagai "tukang rekapitulasi". Dua frame ini ditonjolkan SKH Pos Kupang dan Timex dengan menggunakan perangkat penalaran tertentu guna memperkuat basis pembenaran masing-masing.

Kata Kunci : Frame, Analisis Framing, Berita, Konflik Pilkada

Media Lokal dalam Konstelasi Politik

Konflik pasca pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang dilaporkan Harian Pagi Timor Express (Timex) edisi 31 Agustus 2013, akhirnya menelan korban jiwa. Dalam *Headline* artikel beritanya yang berjudul *Pilbup SBD Makan Korban*, Harian Pagi Timor Express melaporkan peristiwa ini disebabkan oleh bentrokan yang terjadi antar pendukung pasangan calon.

Begitupun dengan Surat Kabar Harian Pos Kupang dalam *Headline* artikel beritanya edisi 1 September 2013, menggambarkan suasana Kota Weetabula di Kabupaten Sumba Barat Daya mencekam.

Mengambil judul *Weetabula Mencekam*, SKH Pos Kupang melaporkan bahwa telah terjadi saling serang diantara dua kelompok warga yang menyebabkan tiga orang tewas.

¹ Penulis merupakan Alumni di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Laporan dua media lokal ini pun diwarnai oleh beragam *statement* politik pihak yang pro dan kontra dari kedua pasangan bupati. Mengingat adanya perbedaan ideologi dengan kelompok yang berkepentingan dalam kedua media ini, tentunya berakibat pada pemaknaan realitas yang berbeda sehingga mempengaruhi proses produksi teks berita

SKH Pos Kupang maupun Timex. Dalam konteks peliputan konflik pasca pilkada Sumba Barat Daya, baik Pos Kupang maupun Timex mengemas berita dengan beberapa cara, seperti meletakkannya di judul berita (*heading*), pada foto, keterangan foto, atau pada kalimat-kalimat pembuka berita (*leads*). Teknik ini dilakukan untuk membantu pembaca mengenali dengan cepat misi yang dikehendaki.

Apa yang dilakukan SKH Pos Kupang dan Timex menjawab bahwa pelaksanaan pesta demokrasi apa pun bentuknya mulai dari pemilihan presiden, gubernur, walikota hingga bupati, senantiasa akan mendapat tempat di media massa. Dalam konteks lokal, keterkaitan pers dan dunia politik, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi satu fenomena yang tak terpisahkan.

Menurut Bourdieu, sebagaimana yang diuraikan Dosi (2012 : 80) dalam bukunya *Media Massa Dalam Jaringan Kekuasaan*, bahwa yang dimaksudkan dengan wacana sebagai arena (*field*) adalah dalam wacana itu terjadi pertarungan atau perjuangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok atau kelas sosial yang berbeda untuk mempertegas dan memperlihatkan pengaruh serta kekuatannya. Hal ini membuat media sebagai arena perang simbolik oleh para elit yang berkepentingan. Dimana masing-masing pihak menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu

persoalan agar diterima oleh khalayak. Media dilihat sebagai forum bertemunya pihak-pihak dengan kepentingan, latar belakang dan sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam konteks inilah mereka menggunakan bahasa simbol atau retorika dengan konotasi tertentu yang umumnya bermuara pada membenarkan tindakan sendiri dan memburukkan pihak lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa berita merupakan fakta media vs realitas sosial. Berita adalah hasil konstruksi media massa bukanlah cerminan dari realitas. Media tidaklah mereproduksi, melainkan menentukan realitas melalui kata-kata terpilih.

Fenomena ini pun dapat dilihat ketika media massa khususnya media cetak lokal ikut berkontribusi terhadap pelaksanaan pilkada di Maluku Utara. Mengambil peristiwa konflik pilkada Maluku Utara yang berujung pada tindak anarkis pendukung pasangan calon Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo dan Thaib Armain-Gani Kasuba, Delfiansah (2009 : xxvi) menyoroti netralitas dari dua SKH Lokal yakni Mimbar Kieraha dan Malut Post. Dalam penelitian ini didapati Mimbar Kieraha lebih condong membahas tentang calon gubernur pasangan Thaib Armain-Gani Kasuba, sedangkan Malut Post sebaliknya hanya condong membahas tentang Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo. Hal ini nampak dari simpang siurnya pengumuman hasil pilkada Maluku Utara dimana terdapat dua versi yang berbeda. Mimbar Kieraha mengklaim kubu Abdul Gafur yang memperoleh suara terbanyak sedangkan Malut Post dibagian iklan terdapat ucapan selamat atas terpilihnya Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Menarik, karena kejadian tersebut terjadi pada edisi hari, tanggal dan bulan yang sama.

Begitupun saat pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota

Surabaya periode 2010-2014 yang diwarnai perseteruan dua pasangan calon. Menurut Abdullah (2010 : 6), putusan MK yang memenangkan pasangan Tri dan Bambang DH (Ridho) dikonstruksi oleh Jawa Pos sebagai keputusan yang mengejutkan. Dari semua fakta dan sumber berita yang dipilih oleh Jawa Pos lebih menempatkan putusan MK sebagai putusan yang janggal. Sedangkan menurut perspektif Surya, putusan MK tersebut tidak dinilai sebagai putusan yang janggal. Dari semua fakta dan sumber berita yang dipilih oleh Surya, lebih menempatkan putusan MK sebagai putusan yang wajar, karena banyak fakta yang dipilih Surya sebagai landasan keluarnya putusan tersebut.

Pada akhirnya, penelitian yang mengangkat *frame* pemberitaan Surat Kabar Harian Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express terhadap konflik pasca pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya, ingin menegaskan bahwa konflik pemilihan kepala daerah seolah menjadi kewajiban bagi penyelenggaraan proses demokratisasi di Indonesia dan oleh karenanya mendorong media lokal untuk menampung berbagai argumen dari para elite yang berkepentingan serta kemajemukan aspirasi masyarakat lokal-komunitas.

Melihat peristiwa pilkada di Sumba Barat Daya (SBD) yang berujung pada konflik dan menuai kontroversi di kalangan masyarakat NTT khususnya SBD, maka menjadi penting untuk menakar sejauh mana pendefinisian realitas oleh media sebagai pilar keempat bagi masyarakat. Kecenderungan politik SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express yang notabene menjadi patron informasi bagi sebagian besar masyarakat NTT, kemudian menjadi substansial untuk ditelaah lebih jauh. Bagaimana sebenarnya kedua media ini memainkan peran kekuasaan politik

dalam praktik wacananya, menjadikan *frame* pemberitaan konflik pilkada SBD merupakan kekuasaan yang tercetak.

Media dan Berita dalam Paradigma Konstruksionis

Bila dirunut kebelakang, menurut catatan Eriyanto (2005 : 13), konsep mengenai konstruksionisme sendiri diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger. Bersama Thomas Luckman, Berger (dalam Eriyanto : 15) menyatakan, realitas tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, realitas itu dibentuk dan dikonstruksi. Dengan demikian, realitas berwajah ganda atau plural. Apa yang diungkapkan Berger ini bagi Eriyanto (2005 : 16) berarti, setiap orang yang mempunyai pengalaman, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu, akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu menafsirkan realitas sosial dengan konstruksinya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan ilmu komunikasi, pandangan ini menurut Penmann (dalam Elvinaro dan Anees, 2009 : 158), menjadikan tindakan komunikatif bersifat sukarela. Hal ini didasarkan pada pembuat komunikasi adalah subjek yang memiliki pilihan bebas. Lebih lanjut menurut Penmann, konstruktivis memandang pengetahuan adalah sebuah produk sosial dan bersifat kontekstual. Produk sosial berarti bukanlah sesuatu yang objektif melainkan merupakan hasil dari interaksi dalam kelompok sosial. Pengetahuan ini dapat ditemukan dalam bahasa, melalui bahasa itulah konstruksi realitas tercipta. Sementara pengetahuan yang bersifat kontekstual berarti pengetahuan merupakan produk dari ruang dan waktu. Oleh karena nya dapat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketika ditarik dalam konteks media dan proses produksi berita, berarti media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Bagi Hamad (2004 : 10) pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media adalah hasil para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya. Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*). Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna.

Armando beranggapan (2011 : 3) bahwa lebih dari sekedar fungsi informasi, media juga menjalankan fungsi pemberi interpretasi dan mengkorelasikan masyarakat agar mengambil sikap bersama terhadap isu-isu yang diangkat media. Dalam kasus konflik yang melibatkan banyak pihak dalam masyarakat, media bisa berperan besar dalam membangun pemahaman publik tentang konflik. Peran pengarah interpretasi dan pembentuk opini umum inilah yang dalam pandangan paradigma konstruksionis melihat media sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas.

Framing dalam Media Massa Hingga Pertarungan Simbolik

Sejatinya konsep framing dalam studi media merupakan bibit baru yang banyak mendapat pengaruh dari dimensi sosiologis dan psikologis. Secara sosiologis, menurut Ervin Goffman (dalam Siahaan, 2001

: 77), konsep *frame analysis* memelihara kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasikan, mengorganisasi, dan menginterpretasi secara aktif pengalaman-pengalaman hidup untuk dapat memahaminya. Interpretasi inilah yang disebut *frames*, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi, dan memberi label terhadap peristiwa-peristiwa serta informasi.

Sementara itu framing dalam konsep psikologis dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik sehingga elemen-elemen tertentu suatu isu memperoleh alokasi sumber kognitif individu yang lebih besar. Eriyanto (2005 : 72) menambahkan, secara psikologis orang cenderung menyederhanakan realitas bukan hanya agar terlihat lebih sederhana dan dapat dipahami tetapi juga agar mempunyai perspektif tertentu. Karenanya, realitas yang sama bisa digambarkan secara berbeda oleh orang yang berbeda, karena setiap orang memiliki pandangan dan perspektif yang juga berbeda.

Hingga pada akhirnya, framing menentukan bagaimana realitas itu hadir dihadapan pembaca. Menurut Entman (dalam Eriyanto, 2005 : 69) ada dua aspek penting dalam framing. *Pertama*, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). *Kedua*, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu.

Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapat alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2005 : 70).

Nugroho (1999 : 23) menambahkan, dalam hubungannya dengan penelitian berita, framing dapat mengakibatkan suatu peristiwa yang sama menghasilkan berita yang secara radikal berbeda apabila wartawan mempunyai *frame* yang berbeda ketika melihat hal tersebut dan menuliskan pandangannya dalam berita. Oleh Lippmann (dalam Nugroho, 1995 : 23) hal ini akan menyebabkan terjadinya dua realitas yakni "realitas yang sesungguhnya" dan "realitas media".

Analisis framing memandang memandang wacana berita sebagai semacam arena perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pokok persoalan wacana. Masing-masing pihak menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan agar diterima oleh khalayak. Dalam konteks inilah mereka menggunakan bahasa-bahasa simbolik atau retorika dengan konotasi tertentu yang umumnya bermuara pada membenarkan tindakan sendiri dan memburukkan pihak lain. Keputusan atau kecenderungan media diantaranya juga dipengaruhi oleh sumber elite yang diwawancarai.

Menurut Nugroho (1999 : 27) dampak perang simbolik ini bermacam-macam. Tidak jarang perang simbolik ini menghasilkan efek mendukung yang dalam bentuk konkritnya berupa penggambaran positif mengenai diri sendiri dan penggambaran dengan nada negatif pihak lawan bicara.

Sebagai arena perang simbolik maka

framing relevan dibahas dalam konteks bagaimana media memahami masalah sosial. Peristiwa-peristiwa penting yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik selalu menarik perhatian masyarakat dan memfokuskannya pada problem sosial tertentu. Peristiwa ini umumnya mendorong kalangan media untuk menghadirkan suatu diskusi dimana semua pihak dapat menyuarakan pendapat dan penafsirannya.

Hal ini berarti, konsepsi framing mengenai penonjolan aspek-aspek tertentu dan seleksi isu, tidaklah membuat suatu realitas sosial didefenisikan bias, melainkan sebagai upaya media yang menjadi sarana pertarungan para elite untuk menyuguhkan pandangan tertentu agar dapat diterima publik.

Framing Model Entman dalam Mengungkap Kecenderungan Ideologi Media

Konsepsi framing, oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi lebih besar daripada isu yang lain (Eriyanto, 2005 : 186). Dalam konsepsi Entman (dalam Eriyanto, 2005 : 188), framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan defenisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Menurut Entman (dalam Eriyanto, 2005 : 189), *frame* berita timbul dalam dua level. *Pertama*, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. *Kedua*, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian

mengenai peristiwa. *Frame* berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita. Pada titik ini, titik ini, apa yang telah diuraikan Entman menunjukkan bahwa *frame* media tidak lain mencerminkan ideologi yang dipegang oleh media itu sendiri. Proses produksi berita itu bagi Hall sebagaimana yang dikutip Eriyanto (2005 : hal.136), bukanlah sesuatu yang netral, melainkan ada bias ideologi yang secara sadar atau tidak sadar tengah dipraktikkan media. Disini, lebih lanjut diurai Hall (dalam Eriyanto, 2005 : hal.136), media dipandang sebagai agen konspiratif yang menyembunyikan fakta, menampilkan fakta tertentu yang dikehendaki dan secara sadar mengelabui khalayak.

Kesengajaan KPU vs Ketidaksengajaan KPU dalam *Frame* Konflik Pilkada SBD

Perhelatan politik lima tahunan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) masih menuai kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, pihak KPUD kabupaten SBD yang telah menetapkan pasangan Markus Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha (MDT-DT) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih periode 2013-2018, terpaksa menganulir keputusannya karena terbukti telah terjadi penggelembungan 13.000 lebih suara. Peristiwa ini terjadi setelah kasus ini digiring ke ranah hukum pidana oleh pasangan KONco OLE ATE karena merasa dirugikan oleh KPUD SBD.

Peristiwa ini menjadi menarik karena sebelumnya pihak Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 29 Agustus 2013, menolak permohonan gugatan pihak KONco OLE ATE dengan tidak membuka

barang bukti berupa kotak suara sebanyak 144 buah yang diduga kuat sebagai bukti kecurangan. Hal ini menjadi polemik karena hingga saat ini di Indonesia belum ada aturan UU yang mengatur soal pleno ulang atau melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat terhadap sengketa pilkada seperti dalam kasus SBD.

Mengingat peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi, maka menjadi penting untuk menakar sejauh mana media lokal NTT membingkai peristiwa konflik pasca pilkada SBD, khususnya dua surat kabar terbesar di NTT yakni Surat Kabar Harian (SKH)Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express. Ini didasarkan dalam setiap pemberitaannya terdapat sejumlah perbedaan pengemasan dan *frame* yang ditunjukkan keduanya

Dalam konteks peliputan konflik pasca pilkada Sumba Barat Daya, baik Pos Kupang maupun Timor Express mengemas berita dengan beberapa cara, seperti meletakkannya di judul berita (*heading*), pada foto, keterangan foto, atau pada kalimat-kalimat pembuka berita (*leads*). Teknik ini dilakukan untuk membantu pembaca mengenali dengan cepat misi yang dikehendaki oleh kedua media ini dalam pemberitaannya.

SKH Pos Kupang menurunkan berita terkait konflik pasca pilkada SBD terhitung dari edisi 11 Agustus 2013 hingga 05 Oktober 2011. Sementara Harian Pagi Timor Express (Timex) menyajikan pemberitaan konflik pasca pilkada SBD dengan edisi 30 Agustus 2013 hingga 02 Oktober 2013. Dari keseluruhan artikel berita ini, peneliti mengelompokkannya menjadi tiga kelompok berita yakni, berita tentang penyebab terjadinya konflik, berita

terkait dampak yang ditimbulkan dari konflik dan berita tentang upaya penyelesaian konflik pasca pilkada Sumba Barat Daya. Pengelompokan berita dilakukan peneliti untuk melihat dari berbagai peristiwa konflik pasca pilkada SBD yang ditampilkan dua surat kabar lokal ini dari *angle* yang berbeda-beda.

Berdasarkan analisis framing model Entman, maka didapati, **pertama, penyebab terjadinya konflik**. Bagi SKH Pos Kupang, penyebab terjadinya konflik disebabkan oleh perampokan suara rakyat oleh KPU SBD. Akibatnya, '*KPU SBD Penjahat Demokrasi*' adalah bingkai inti yang dibangun SKH Pos Kupang untuk menggiring pemahaman khalayak melihat pemicu terjadinya konflik.

Aspek lain yang digunakan untuk mengukuhkan bingkai ini yakni dengan menonjolkan sikap penolakan KONCO OLE ATE kepada KPU SBD yang mengajukan gugatan ke MK melalui *lead*-nya. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pembaca agar mulai berpikir bahwa KPU SBD telah melakukan kecurangan dalam pilkada.

Pasangan calon dr. Kornelis Kodi Mete-Drs. Daud Lende Umbu Moto atau KONCO OLE ATE menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan menampilkan *lead* ini, SKH Pos Kupang mulai merambah ke aspek hukum yang digambarkan dengan penggunaan kata '*menggugat*'. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), '*menggugat*' mengandung arti mendakwa; mengadukan (perkara); menuntut dan tuntutan. Kata ini amat jelas merepresentasikan peristiwa ini sebagai masalah hukum oleh SKH Pos Kupang. Dalam *lead* yang mengedepankan peristiwa digugatnya KPU SBD oleh pasangan calon yang kalah, boleh jadi merupakan strategi

SKH Pos Kupang untuk membentuk citra tertentu. Dengan memilih fakta ini berarti SKH Pos Kupang melupakan atau membuang fakta lain yakni asas tak bersalah terhadap KPU SBD. SKH Pos Kupang memilih digugatnya KPU SBD, pihak yang patut disalahkan, sebagai suatu peristiwa yang lebih layak untuk dijadikan agenda masyarakat. Sebaliknya, Timex melihat penyebab terjadinya konflik lebih disebabkan oleh ketidakberdayaan KPU SBD sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu tingkat kabupaten. Oleh karenanya, '*KPU SBD Tidak Profesional*' bagi Harian Pagi Timor Express merupakan *frame* yang tepat dalam memberikan penekanan di benak khalayak terhadap penyebab terjadinya konflik.

Ini dapat dipantau dari komentar Ketua KPU SBD, Yohanes Bili Kii yang mengakui tidak bisa berbuat banyak terhadap keberpihakan para anggotanya kepada salah satu bakal calon. Berikut pernyataan Bili Kii yang ditampilkan Timex :

Terhadap hal ini, Ketua KPU Kabupaten SBD, Yohanes Bili Kii, telah mengakuinya kepada Fajar Media Center (FMC), Selasa, (26/8) lalu. Yohanes bahkan mengaku tidak bisa berbuat banyak, setelah mengetahui beberapa anggotanya masing-masing membela pasangan calon tertentu.

Secara teknis, komentar diatas bila ditinjau dari karakteristik bahasa jurnalistik tentulah menarik. Dengan menonjolkan fakta Ketua KPU SBD yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tindakan para anggotanya, jelas menarik minat dan perhatian pembaca untuk melihat ketidakberdayaan KPU SBD dalam penyelenggaraan pilkada, terlebih ini ditampilkan Timex dalam akhir berita sebagai penegas dari sub judul yang telah dibuat. Sehingga pertanyaan yang timbul pada

isi berita, mengapa KPU SBD disebut tidak profesional terjawab dengan puas pada akhir cerita. KPU SBD dalam hal ini diposisikan Timex sebagai pihak yang lemah (namun bukan penyebab kesalahan).

Walaupun memahami masalah penyebab konflik pasca pilkada ini sebagai bentuk ketidakberdayaan KPU SBD, pada *lead* yang menjadi pembuka berita, Timex justru menunjukkan bentuk dukungan MK terhadap putusan KPU SBD yang menetapkan MDT-DT sebagai pemenang pilkada Berikut *lead* dari Timex :

Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak seluruh permohonan gugatan paket calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya nomor urut 2, Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto. Dalam sidang dengan agenda membacakan putusan perkara tersebut, Kamis (29/8), MK menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan memerintahkan termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan amar putusan tersebut.

Kesan yang ingin dibangun Timex adalah walaupun KPU SBD tidak berdaya, namun ketika MK menolak seluruh gugatan KONco OLE ATE, berarti keputusan KPU SBD dalam menetapkan perolehan suara sekaligus bupati dan wakil bupati terpilih adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum.

Selain tampak '*menonjok*', *lead* yang diangkat Timex pun menunjukkan bentuk yang tunggal atau dalam bahasa Lorenz & Vivian (1995 : 54) disebut '*single-incident leads*'. Ini merupakan *lead* yang berfokus pada satu peristiwa dan satu situasi yang nantinya akan dikembangkan dalam tubuh berita. Namun perlu diingat bahwa *lead* ini hanya berfokus pada unsur yang dianggap paling

penting dan merupakan klimaks dari gagasan yang ingin disampaikan. Timex ketika menurunkan *lead*, jelas hanya berfokus pada satu peristiwa dan satu situasi, yakni jalannya sidang di peradilan MK dan ditolaknya gugatan KONco OLE ATE. Ini nampak dari kalimat '*Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak seluruh permohonan gugatan*' dan '*dalam sidang dengan agenda membacakan putusan perkara tersebut*'. Dengan menampilkan kalimat '*akhirnya menolak*', Timex seakan ingin mengatakan bahwa sudah sedari dulu kemenangan MDT-DT adalah sah dan murni kehendak masyarakat SBD.

Di sisi lain, SKH Pos Kupang dengan mengedepankan penonjolan sikap KONco OLE ATE yang menggugat KPU SBD, menjadikan nilai beritanya sarat akan konflik. Setelah sehari sebelumnya menurunkan berita terkait kemenangan pasangan MDT-DT, dengan dilaporkannya KPU SBD ke MK maka menunjukkan pertentangan dan konflik yang terbuka antar pasangan KONco OLE ATE dan KPU SBD. Konflik ini ibarat drama yang disajikan SKH Pos Kupang dihadapan pembacanya. Peristiwa yang mengandung konflik tidak hanya menarik minat pembaca. Stovall (2007 : 07) bahkan mengungkapkan bahwa konflik merupakan salah satu nilai berita favorit wartawan karena peristiwa ini memastikan adanya cerita yang menarik untuk ditulis.

Jika SKH Pos Kupang sarat akan nilai berita konflik, maka Timex lebih menekankan nilai berita pada dampak (*impact*) dan ketegangan (*suspense*). Bagi Timex, realitas ditolaknya gugatan KONco OLE ATE oleh MK akan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat SBD, karena inilah yang menentukan siapa yang akan memimpin daerah itu lima tahun mendatang. Sementara nilai berita ketegangan (*suspense*) ditunjukkan Timex dengan dengan mendeskripsikan suasana sidang yang '*tegang*'.

Melihat bagaimana SKH Pos Kupang dan Timex menyeleksi peristiwa berdasarkan nilai berita, maka hal ini jelas tak lepas dari ideologi media massa. Bagi Eriyanto (2005: 104), ideologi wartawan yang paling jelas dan kentara adalah berita. Namun, suatu peristiwa tak lantas dapat disebut sebagai berita jika tidak memenuhi kriteria nilai berita. Itulah sebabnya nilai berita menentukan bukan hanya peristiwa apa saja yang akan diberitakan, melainkan bagaimana peristiwa tersebut dikemas. Ini adalah prosedur pertama dari bagaimana peristiwa dikonstruksi.

Kedua, dampak terjadinya Konflik.

Secara keseluruhan, SKH Pos Kupang mengaggap dampak terjadinya konflik akan mengakibatkan pertumpahan darah. Ini dicerminkan dengan *frame* 'Konflik Pilkada Akibatkan Pertumpahan Darah'. Sebaliknya Timex mengaggap dampak dari konflik pilkada di Kabupaten SBD adalah meningkatnya aksi anarkis warga. Untuk itu Timex menampilkan *frame* 'Konflik Pilkada Akibatkan Aksi Anarkis'. Penggunaan kata 'pertumpahan darah' dan 'aksi anarkis' tentulah akan berbeda jika dimaknai. 'Pertumpahan darah' bermakna konflik pilkada merupakan bencana besar, sementara 'aksi anarkis' bisa dimaknai sebagai tindakan yang wajar dalam pesta demokrasi.

Sebagai konsekuensi dengan menampilkan *frame* inti 'Pemilu SBD Akibatkan Aksi Anarkis', maka Timex dalam menyajikan informasi cenderung menggunakan kata bermakna denotatif. Mengapa demikian? Peristiwa aksi anarkis, jika ditinjau dari pemikiran Sumadiria (2010 : 28) merupakan peristiwa yang sifatnya fisik kuantitatif, sehingga bahasa jurnalistik harus mengutamakan kata-kata dan kalimat denotatif. Dengan begitu, pembaca hanya dihadapkan kepada satu pilihan arti atau

makna seperti yang dikehendaki wartawan sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi. Namun, ketika menggambarkan keadaan korban jiwa, Timex lebih memilih untuk menggunakan kata atau kalimat bermakna konotatif :

Bili tewas ditempat karena terkena panah di lehernya, sedangkan Mbora meninggal dunia saat dirawat di RSUD Wetabula. Informasi yang dihimpun menyebutkan jenazah Ngongo Dama tewas dengan luka potong di hampir seluruh bagian tubuhnya.

Dengan kata atau kalimat 'tewas', 'terkena panah di lehernya' dan 'luka potong di hampir seluruh bagian tubuhnya', akan lebih menimbulkan perasaan tertentu secara emosional dan bagi Keraf (dalam Sumadiria, 2010: 28), di pihak lain, kata yang dipilih itu memperlihatkan bahwa penulisnya juga memendam perasaan yang sama.

Bingkai lain yang dibangun SKH Pos Kupang yakni menyesalkan sikap KPU SBD yang melakukan penggelembungan suara. Menurut SKH Pos Kupang konflik pilkada SBD adalah imbas dari 'Permainan KPU SBD'. Untuk mendukung bingkai ini, SKH Pos Kupang cenderung menampilkan pertumpahan darah akibat permainan 'kotor' KPU SBD.

Pilihan kata, istilah, metafora hingga kalimat tertentu yang dipakai SKH pos Kupang dalam menggambarkan situasi dan kondisi di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), pasca keputusan penolakan gugatan KONCO OLE ATE oleh Mahkamah Konstitusi (MK), nampaknya dilihat sebagai peristiwa berdarah. Hal ini teridentifikasi ketika SKH Pos Kupang menampilkan judul 'Kamis Berdarah '98 Bisa Terulang Lagi' yang dipertajam dengan sub judul 'Jika MDT-DT Dilantik Jadi Bupati-Wabup SBD'. Apa gerangan yang membuat SKH Pos Kupang meng-

hubungkan konflik pilkada ini dengan peristiwa berdarah '98

Secara historis, berdasarkan informasi yang dilansir Jaringan Gerakan Masyarakat Adat NTT (JAGAT-NTT dalam apchr.murdoch.edu.au), peristiwa '98 merupakan insiden kerusuhan, yang lebih tepat disebut perang antar suku, yaitu Suku Weejewa dan Suku Loli yang dipicu oleh kecurangan dalam seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) Provinsi NTT. Disinyalir beberapa nama yang lolos dalam seleksi tidak pernah ikut serta dalam seleksi. Menurut kabar yang beredar orang-orang yang tanpa tes diterima menjadi CPNS tersebut berasal dari suku Weejewa. Sementara, orang-orang dari suku Loli banyak yang tidak lolos seleksi CPNS. Tanpa diduga, sehari setelah pengumuman penerimaan CPNS pada tanggal 24 Oktober lalu, muncul unjuk rasa memprotes hasil tes yang tidak adil tersebut. Pada 1 November 1998, unjuk rasa memprotes hasil tes perlahan berubah menjadi tuntutan agar Bupati Rudolf Mallo, yang entah kebetulan atau tidak berasal dari Suku Weejewa dan Kabag Personalia Daud Pakereng turun dari jabatannya.

Puncaknya pada Kamis 5 November, pertempuran pecah dalam kota Waikabubak dengan perkelahian massal antara kedua suku yang menewaskan 50 orang dan puluhan rumah serta toko dihujani batu, dibakar, dan dijarah. Mayat-mayat korban yang tewas bergelimpangan di mana-mana, dengan luka-luka yang cukup parah bahkan ada yang dengan kepala terpenggal dan anggota tubuh terpisah dari badan, tanpa bisa diambil oleh keluarga korban.

Dengan mengungkit peristiwa '98 dengan pilkada Kabupaten SBD, SKH Pos Kupang ingin menunjukkan benang merah dari kedua peristiwa ini yakni sama-sama diwarnai kecurangan yang sarat akan KKN

(Kolusi Korupsi Nepotisme). Bahkan pembatalan pelantikan MDT-DT dianggap sebagai tindakan yang menegakan keadilan dan kebenaran :

... meminta agar gubernur segera menindak lanjuti demi tegaknya keadilan dan kebenaran di daerah itu.

Dengan pernyataan ini, SKH Pos Kupang ingin membangkitkan kesan seolah keadilan dan kebenaran akan lenyap jika MDT-DT dilantik karena mengesahkan hasil rekayasa. Menghadirkan realitas semacam ini, SKH Pos Kupang secara implisit menganggap kemenangan MDT-DT tidak sah dan ilegal.

Sedangkan Timex tampak lebih abstrak dengan menyebut '*Permainan Aktor Tingkat Tinggi*' sebagai penyebab masalah. Untuk membangun kesan ini, Timex pun mengutip pernyataan Kornelis Kodi Mete.

Sebagai warga negara yang taat hukum, saya menghormati putusan MK tersebut. Tapi secara pribadi, kami meyakini adanya permainan tingkat tinggi dalam kasus pemilu pilkada SBD,

Dari pernyataan diatas, tak ada penjelasan siapa dan apa yang dimaksudkan dengan permainan tingkat tinggi. Namun, titik terang adanya permainan tingkat tinggi sedikit diungkap Timex dalam paragraf ke-10 dengan menyebut adanya penjahat politik.

Dikatakan, KPU dan Panwaslu SBD adalah dua lembaga yang dihuni oleh penjahat politik yang menipu suara mayoritas rakyat diwilayah tersebut.

Tudingan Kodi Mete ini lalu ditutup oleh Timex dengan kalimat penegas pada akhir paragraf, yakni :

Tapi sebagai warga negara yang baik saya tetap menghormati keputusan MK

meskipun keputusan MK itu sangat merugikan saya dan warga SBD.

Walaupun mengutip komentar Kodi Mete yang menyebut KPU dan Panwaslu SBD dihuni oleh penjahat politik, Timex langsung menyusul tuduhan inidengan mengedepankan asas tak bersalah yakni tetap menunggu penyelidikan oleh pihak kepolisian. Hal ini ditunjukkan Timex dengan kalimat : *'la memberikan kesempatan kepada aparat keamanan untuk menyelidiki kasus terkait pemilukada SBD'*.

Sementara itu, melihat dampak terjadinya konflik yang dibangun SKH pos Kupang, secara otomatis menempatkan KONco OLE ATE sebagai korban, ini berarti pihak KONco OLE ATE yang akan ditampilkan sebagai subjek dalam pemberitaannya. Dengan posisi inilah maka peristiwa Kamis Berdarah '98 hadir dihadapan khalayak. Sebenarnya, jika ditinjau secara teknis, peristiwa Kamis Berdarah '98 dan pelantikan MDT-DT adalah dua fakta yang berbeda. Namun, dengan pengemasan berita yang mempertautkan atau menunjukkan jalinan antar kata dan kalimat dalam teks, menjadikan dua fakta yang tidak berhubungan ini dapat menjadi berhubungan ketika seseorang menghubungkannya.

Lihat saja dua peristiwa ini menjadi berhubungan sebab akibat ketika dihubungkan dengan kata hubung *'jika'* sehingga kalimatnya menjadi *'Kamis Berdarah '98 bisa terulang lagi jika MDT-DT Dilantik jadi Bupati-Wabup SBD'*. Sebaliknya, dua peristiwa ini menjadi tidak berhubungan ketika dipakai kata hubung *'dan'*, dimana kalimatnya kemudian menjadi *'Kamis Berdarah '98 bisa terulang lagi dan MDT-DT dilantik jadi Bupati-Wabup SBD'*.

Inilah yang oleh Van Djik (dalam Eriyanto,

2012 : 242) disebut koherensi yang merupakan elemen wacana untuk melihat bagaimana media secara strategis menggunakan wacana untuk menjelaskan suatu fakta atau peristiwa. Apakah peristiwa itu dipandang saling terpisah, berhubungan atau malah sebab akibat. Bagi Eriyanto (2012 : 242), pilihan koherensi yang diambil ditentukan oleh sejauh mana kepentingan komunikator terhadap peristiwa tersebut.

Ketiga, upaya penyelesaian konflik.

Dari seluruh konstruksi yang dibangun SKH Pos Kupang, pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yakni lantik KONco OLE ATE. Mendukung konstruksi ini, maka SKH Pos Kupang meyakinkan khalayak bahwa putusan KPU SBD yang membatalkan kemenangan MDT-DT merupakan putusan yang benar dan adil. Upaya untuk terus mendegradasi kemenangan MDT-DT dilakukan SKH Pos Kupang dengan menyebut putusan MK telah melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat SBD. Praktik bahasa yang dilakukan SKH Pos Kupang menunjukkan konstruksi peristiwa yang dilakukannya bukan saja memberikan konteks, tapi juga mengambil alih peran untuk menentukan nilai apa yang dipertahankan dan apa yang dibuang. Polemik kemenangan pasangan ini juga diurai SKH Pos Kupang dalam *lead*-nya :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) tidak mengetahui hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) SBD tanggal 10 Agustus 2013 yang menetapkan paket Markus Dairo Talu-Dara Tanggu (MDT-DT) sebagai pemenang Pilkada SBD karena tidak pernah tercatat secara administrasi di lembaga itu untuk kemudian diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur NTT.

Uraian *lead* ini juga mengesankan hasil pleno pertama KPU SBD cacat hukum. Untuk mendukung *lead* yang dibuat, SKH Pos Kupang menampilkan seruan Kelompok Solidaritas Masyarakat NTT Peduli SBD :

Mereka membawa beberapa poster bertuliskan, *Tolak Keputusan MK tanggal 28 Agustus 2013 tentang sengketa Pilkada SBD, Penjarakan aktor di balik kecurangan pilkada SBD, Selamatkan SBD dari tindakan provokasi yang dilakukan MDT-DT dan Keputusan MK Bunuh Rakyat SBD.*

Penggambaran peristiwa semacam ini jelas saja akan menguntungkan pihak KONco OLE ATE. Hal inilah yang oleh Eriyanto (2005: 22) membuat media di pandang sebagai agen konstruksi sosial. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan.

Sedangkan Timex, dari semua gagasan yang dilempar untuk menjadikan tujuan ini sah, maka Timex berusaha mengedepankan fakta terkait pleno ulang KPU SBD yang ilegal karena cacat hukum. Mengedepankan fakta ini, berarti secara implisit Timex berupaya mengajak semua pihak agar menghormati dan menaati putusan MK. Pelantikan MDT-DT harus dilakukan sesuai amar keputusan MK. Mengajak semua pihak untuk menghormati putusan MK, maka sama saja dengan mendesak agar pelantikan MDT-DT segera dilaksanakan. Apa yang dilakukan Timex menurut Hamad (2004 : 26), sejatinya dapat menjadi alasan bagaimana sebuah media dikatakan menjadi lebih ideologis. Menjadi ideologis dikarenakan konstruksi realitas yang dibangun bersifat pembelaan terhadap kelompok atau kepentingan tertentu dan penyerangan terhadap kelompok yang berbeda haluan.

Apa yang dilakukan Timex seolah mengaburkan fakta penggelembungan suara yang terjadi pada rapat pleno pertama tanggal 10 Agustus 2013. Bukan hanya tidak memenuhi syarat UU, pleno ulang oleh KPU SBD juga dianggap Timex tidak jelas temanya. Kemenangan MDT-DT yang harus diterima terus ditonjolkan Timex ketika menurunkan *headline* beritanya edisi Sabtu 28 September 2013 dengan judul '*Pleno KPU Tak Pengaruhi Putusan MK*' :

... perhitungan ulang Polres Sumba Barat dan pleno oleh KPU SBD tidak lagi berpengaruh terhadap putusan MK, karena hanya sebagai upaya untuk membuktikan kasus pidana yang ditangani Polres Sumba Barat.

Dari teks di atas dapat dilihat bagaimana Timex menekankan posisi dari berbagai aktor yang berkepentingan dalam konflik pasca pilkada Kabupaten SBD. Dalam kasus ini tampak Timex menempatkan KPU NTT sebagai subjek dan KPU SBD sebagai objek. Sebagai subjek, KPU NTT akan menceritakan, tentu saja dengan perspektif dan kepentingannya. Kepentingan KPU SBD disini adalah menolak pleno ulang KPU SBD dan mendukung putusan MK karena bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, khalayak tergantung sepenuhnya kepada narator (KPU NTT) yang disini bukan hanya menampilkan dirinya sendiri tetapi juga sebagai juru warta kebenaran.

Dari keseluruhan hasil analisis framing Model Entman terhadap pemberitaan konflik pasca pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Surat Kabar Harian Pos Kupang (SKH Pos Kupang) dan Harian Pagi Timor Express (Timex), peneliti mendapati kedua media ini secara implisit menunjukkan keberpihakan mereka terhadap kelompok tertentu. Keberpihakan ini dapat

dilihat berdasarkan dua dimensi besar Entman (2005 : 187).

Pertama, seleksi isu. Bagaimana SKH Pos Kupang dan Timex memilih fakta atau realitas yang beragam dari konflik pasca pilkada Kabupaten SBD untuk ditampilkan. Baik SKH Pos Kupang maupun Timex dalam konstruksinya selalu ada realitas yang dimasukkan (*included*), tetapi ada pula realitas yang dikeluarkan atau dikaburkan (*excluded*). Tidak semua bagian dari isu ditampilkan. Disini SKH Pos Kupang dan Timex memilih aspek tertentu dari suatu isu.

Kedua, penonjolan aspek tertentu dari isu. Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta yang dilakukan oleh SKH Pos Kupang dan Timex. Ketika fakta atau realitas telah dipilih oleh kedua media ini, maka menjadi penting untuk melihat bagaimana SKH Pos Kupang dan Timex menulis fakta atau realitas tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Keberadaan SKH Pos Kupang dan Timex sebagai surat kabar lokal terkemuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tampaknya berusaha menunjukkan posisi terbaiknya dalam menyajikan peristiwa konflik pasca pilkada di Kabupaten SBD. Ini jelas menandakan bahasatak pernah lepas dari politik. Meminjam pemikiran Siahann, dkk (2001 : 363) bahwa mustahil kita dapat berbicara tanpa memilih posisi atau sikap tertentu maupun tanpa menyatakan perasaan tertentu. Sebab, memilih memakai bahasa atau kata-kata tertentu, menekankan pengertian tertentu atas kata, bahkan menggunakan dialek tertentu, adalah berpolitik dalam maknanya yang paling luas.

Perbedaan *frame* SKH Pos Kupang dan Timex sejatinya menunjukkan media bukan-

lah saluran yang bebas. Apalagi cerminan dari realitas. Media dengan praktik bahasa dalam teks beritanya, justru mengkonstruksi realitas sedemikian rupa. Lihat saja, peristiwa yang sama diperlakukan secara berbeda oleh SKH Pos Kupang dan Timex. Pada akhirnya, tabel dibawah ini memperlihatkan *frame* besar yang menjadi pijakan dua media ini ketika mengkonstruksi konflik pasca pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Kesimpulan

Penelitian yang menyorot muatan kekuasaan dalam pemberitaan konflik pasca pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), pada akhirnya

SKH Pos Kupang	Timex
Konflik pasca pilkada Kabupaten SBD merupakan bentuk kesengajaan KPU SBD sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu. Konflik pasca pilkada Kabupaten SBD merupakan bentuk ketidaksengajaan KPU SBD sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu.	Dengan dua <i>frame</i> besar ini, disadari atau tidak, berperan besar ketika SKH Pos Kupang dan Timex menghasilkan berbagai judul berita, penempatannya pada <i>headline</i> yang menandakan penting atau tidaknya berita yang dilaporkan hingga pada komentar mana yang akan ditampilkan dan dibuang.

menarik tiga kesimpulan utama yang menunjukkan bagaimana peristiwa ini dibingkai secara berbeda oleh SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express. *Pertama*, SKH Pos Kupang membingkai konflik pasca pilkada di Kabupaten SBD sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan KPU SBD. KPU SBD disebut sebagai "*perampok*" suara rakyat karena telah melakukan penggelembungan suara untuk memenangkan pasangan calon MDT-DT. Sebaliknya, Harian

Pagi Timor Express (Timex) melihat konflik pasca pilkada di Kabupaten SBD merupakan bentuk ketidakberdayaan KPU SBD. Maka KPU SBD oleh Timex disebut sebagai '*tukang rekapitulasi*'. Timex beranggapan ini bukanlah bentuk pelanggaran hukum melainkan cerminan ketidakprofesional seluruh anggota KPU SBD.

Kedua, SKH Pos Kupang membingkai terjadinya konflik dikarenakan efek buruk pilkada. Implikasi dari bingkai ini, pihak KONco OLE ATE ditempatkan sebagai korban dari penggelembungan suara yang dilakukan KPU SBD. Sedangkan Timex terkesan lebih abstrak dengan membingkai terjadinya konflik disebabkan efek buruk politik. Akibatnya, Timex menganggap politik sebagai upaya mengatur negara, amat sering melalui proses perebutan kekuasaan yang tidak sehat.

Ketiga, SKH Pos Kupang membingkai konflik pasca pilkada sebagai bentuk kesengajaan KPU SBD. Implikasi dari bingkai ini adalah SKH Pos Kupang mengedepankan sejumlah fakta penggelembungan suara yang terjadi di Wewewa Tengah dan Wewewa Barat. Sebaliknya, Timex membingkai konflik pasca pilkada sebagai bentuk ketidak-sengajaan KPU SBD. Implikasinya, amar putusan MK yang bersifat final dan mengikat ditonjolkan Timex untuk mendukung keputusan KPU SBD yang memenangkan paket MDT-DT. Menurut Timex, untuk memenangkan paket KON co OLE ATE, MK harus dikalahkan terlebih dahulu. Dengan bingkai ini, KPU SBD menjadi pihak yang dibela Timex dalam teks beritanya. [a]

Daftar Pustaka

Adjidarma, Seno Gumira. 2003. *Kisah Mata, Fotografi antara Dua Subjek*:

- Perbincangan tentang Ada*. Yogyakarta : Galang Press.
- Armando,dkk. 2011. *Media dan Integrasi Sosial: Jembatan antar Umat Beragama*. Jakarta : CSRC.
- Artha, Gusti. 2009. *Konspirasi Media dengan Kandidat Pilkada*. Denpasar : Arti Foundation.
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dosi, Erduardus. 2012. *Media Massa dalam Jaring Kekuasaan*. Maumere : Ledalero.
- Effendy, Onong. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Elvinaro & Anees. 2009. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Simbiosis Rekatama Media
- Eriyanto. 2005. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta : LKIS.
- Eriyanto. 2012. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta : LKIS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- HM, Zaenuddin. 2007. *The Journalist*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Ishwara. 2011. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas
- Karin Wahl & Jorgensen Hanitzsch. 2009. *The Handbook of Journalism Studies*. New York : Routledge.
- Keraf, Gorys. 2007. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kleden dkk. 2007. *15 Tahun Pos Kupang Suara Nusa Tenggara Timur*. Kupang : Timor Media Grafika.
- Kusumaningrat. 2009. *Jurnalistik : Teori dan Praktik*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Latif & Ibrahim. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan*. Jakarta : Mizan

- Liliweri, Alo. 2007. *25 Tahun NTT, Apa Kata Mereka ?*. Kupang : DPD 1 KNPI NTT
- Lorenz, Alfred dan John Vivian. 1995. *News : Reporting and Writing*. Massachusetts: Viacom Company.
- Maleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Morissan dkk. 2010. *Teori Komunikasi Massa*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nugroho, dkk. 1999. *Politik Media Mengemas Berita : Habibie dalam Pemberitaan Kompas, Merdeka, dan Republika*. Jakarta : Institut Studi Arus Informasi.
- Rahardjo dkk. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gitanyali.
- Reese, Stephen dkk. 2001. *Framing Public Life : Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World*. New York : Routledge.
- Santoso dkk. 2010. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siahaan, dkk. 2001. *Pers yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur*. Surabaya : Lembaga Studi Perubahan Sosial.
- Shoemaker, J Pamela & Stephanen D. Reese. 1996. *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. Toronto : Longman Publishers.
- SIP. 2013. *Sumba Barat Daya Dalam Angka 2013*. SBD : BPS Kab. Sumba Barat Daya
- Sobur, Alex. 2010. *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung : Rosda
- Soedjono, Soeprapto. 2006. *Pott-Pourri Fotografi*. Jakarta : Universitas Trisakti
- Soesilo. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Politeia
- Sumadiria, Haris. 2010. *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Stovall, James. 2007. *Journalism : Who, What, When, Where, Why and How*. Boston : Pearson Education
- Strauss & Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wahyudi, J.B. 1991. *Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat Kabar-Majalah, Radio dan Televisi*. Bandung: Alumni

Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Zainal. 2010. *Pembingkaihan Berita Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Coblos Ulang Pilkada Surabaya (Studi Analisis Framing Tentang Berita Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Coblos Ulang Pilkada Surabaya Pada Surat Kabar Jawa Pos dan Surya Edisi 1 s.d 6 Juli 2010)*. Surabaya : UPN Jatim
- Ahmadi, Dadi & Aliyah Nur'aini. 2005. *Teori Penjurukan*. Mediator, Vol. 6/No.2. DIKTI Baehaki, Achmad. 2009. *Pemenuhan Kebutuhan Chatters dalam Program Chat Mate, O Chanel*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Defliansah, Doni. 2009. *Pemberitaan Media Massa Lokal Malut Post dan Mimbar Kieraha Mengenai Konflik Pilkada di Maluku Utara*. Vol 5/No.1. Yogyakarta : UMY.
- Dugis, Noveina. 2008. *PERS DAN KONFLIK PERANG SUKU DI TIMIKA (Analisis Framing tentang Pemberitaan Konflik Perang Suku di Kwamki Lama, Timika dalam SKH Lokal Radar Timika)*. Yogyakarta : UAJY.
- Hakim, Muhammad. 2011. *Demokrasi dalam Pilkada di Indonesia*. Jurnal Humanis. Makassar

: UNHAS

- Jasper Stromback & Lars Nord. 2006. *Do Politicians Lead the Tango ? A Study of the Relationship between Swedish Journalist and their Political Sources in the Context of Election Campaigns*. Vol 21 (2) : 147-164. SAGE Publications.
- Mawardi, Gema. 2012. *Peningkatan Berita Media Online (Analisis Framing Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 September 2011)*. Jakarta : UI
- Nurhadi, Robi. 2008. *Demokratisasi Prosedural dalam Pilkada Jakarta*. Jurnal Politik. Vol.1 No.1
- Rahmantyo, Tri. 2012. *Upaya Peningkatan Kemampuan Resolusi Konflik Melalui Bimbingan Kelompok Bagi Siswa Kelas X-Logam SMK Negeri 1 Kalasan*. Yogyakarta : UNY
- Scheufele, Dietram. 1999. *Framing as a Theory of Media Effects*. International Communication Association.
- Yanti, Merry. 2009. *Menakar Perkembangan Demokrasi di Aras Lokal*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Volume 3, No. 6.
- Yusuf, Awaluddin. 2011. *Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah*. Volume 14. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Artikel Ilmiah

- Curtis, Anthony. 2011. *How to Write a Headline*. Carolina : UNCP
- Elcid, Dominggus. 2013. *Anarki di Barat Daya Bumi Marapu*. Kupang : Victory News Geza r , Langintantyo. *Proses Hukum*. Jakarta: Fisip UI
- Munif, Junaidi Abdul. 2014. *Tumbal dan Eufemisme Politik*. Bogor : Harian Pelita
- Putra, Dion. 2010. *Pers di Negeri Kaum Papa*. Kupang : Konvensi Media Massa Nasional Teweng
- Timo. 2004. *Pilkada Langsung dan Dinamika Politik Lokal*. Denpasar : Bali Post
- Wisnumurti, Oka. 2009. *Peta Politik Nasional dan Lokal*. Denpasar : Konvensi Pendidikan dan Animasi Politik Kaum Muda se-Keuskupan Denpasar.

Sumber Online

- Baihaki, Eki. *Dialektika Peran Media Massa Dalam Masyarakat Yang Berubah*. Diakses pada 12 Februari 2013 dari <http://st288616.sitekno.com/article/5705/dialektika-peran-media-massa-dalam-masyarakat-yang-berubah.html>
- Irawan, Andi. (2011). *Menggugat Makna Demokrasi*. Diakses pada tanggal 24 November 2013 dari <http://www.ispei.org/index.php/analisis-2/13-menggugat-makna-demokrasi>
- Mann Merlin. *Headlines*. Diakses pada 15 Februari 2014 dari http://www.columbia.edu/itc/journalism/isaacs/client_edit/Headlines.html
- Setianis, dkk. *Sistem Politik Indonesia*. Diakses pada 15 Februari 2014 dari <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/isip4213/isi.htm>